



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.1, Juni 2018

TURBULENSI KEPEMIMPINAN DAN KONEKTIVITAS ANTAR NEGARA

- Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un
- Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016
- Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia:
Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas
- Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia
- Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka:
City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor Ekonomi

RESUME PENELITIAN

- Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

REVIEW BUKU

- Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 1	Hlm. 1-127	Jakarta, Juni 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un Indriana Kartini	1–13
• Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016 Meutya Viada Hafid	15–30
• Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas Arif Novianto, dkk	31–48
• Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia Siswanto	49–63
• Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka: <i>City to City Connectivity</i> sebagai Pendukung Koridor Ekonomi Awani Irewati	65–80
Resume Penelitian	
• Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk	81–96
• Problematisasi Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab M. Fakhry Ghafur, dkk	97–113
Review Buku	
• Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen Defbry Margiansyah	115–125
Tentang Penulis	127–128
Pedoman Penulisan	129–133

CATATAN REDAKSI

Kepemimpinan politik mengalami dinamika menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Tak pelak kondisi tersebut menimbulkan konsolidasi di tingkat kepemimpinan maupun justru sebaliknya menimbulkan turbulensi. Meski demikian, konsensus merupakan upaya yang mesti dilakukan dalam menjaga stabilitas nasional maupun hubungan antar negara.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan kepemimpinan. Artikel pertama yang ditulis oleh Indriana Kartini berjudul "DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN", menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom.

Artikel berikutnya, "KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016". Artikel yang ditulis oleh Meutya Viada Hafid ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016.

Sementara itu, artikel "DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS" yang ditulis oleh Arif Novianto, dkk mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme.

Turbulensi kepemimpinan di Amerika Serikat juga dibahas dalam artikel "KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA" yang ditulis oleh Siswanto. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Kebijakan membela kepentingan nasional (*America First*) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (*make America great again*) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian in-konsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Artikel terakhir membahas tentang "DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI" yang ditulis oleh

Awani Irewati. Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Selain kelima artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, dan Nostalgawan Wahyudi, “PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB”. Tulisan ini mengulas berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas

dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif.

Naskah kedua, “POLA PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA: PERSPEKTIF POLITIK”, ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, dan Yusuf Maulana. Tulisan ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Adam Bower “NORMS WITHOUT THE GREAT POWERS: INTERNATIONAL LAW AND CHANGING SOCIAL STANDARDS IN WORLD POLITICS”. *Review* yang ditulis Defbry Margiansyah menelaah tentang institusi internasional dan aturan-aturannya dekade belakangan dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana

dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemimpinan maupun konektivitas antar negara. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 1-13

Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina.

Kata kunci: Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 15-30

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Mereka bertindak bukan hanya sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI, tetapi perubahan tersebut tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI

diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik dari Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan musyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Kata kunci: Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan dan Samodra Wibawa

DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 31-48

Dalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut.

Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tanggapan menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.

Kata kunci: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

DDC: 321.804273

Siswanto

KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 49-63

Latar belakang penulisan artikel ini didasari oleh pertimbangan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Selanjutnya masalah yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah kepribadian inkonsisten Presiden Donald Trump yang berpengaruh kepada lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversi. Kebijakan membela kepentingan nasional (America First) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (make America great again) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian inkonsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Kata kunci: kontroversi, turbulensi, kebijakan Amerika, Presiden Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 65-80

Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Kata kunci: kerja sama subregional, *city to city connectivity*, koridor ekonomi, Selat Malaka

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

RESUME PENELITIAN
POLA PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA OTONOMI
KHUSUS DAN ISTIMEWA:
PERSPEKTIF POLITIK

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 81-96

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan

antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.

Kata kunci: pengawasan, dana otsus/istimewa, perspektif politik.

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

RESUME PENELITIAN
PROBLEMATIKA KEKUATAN
POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI,
KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 97-113

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yang diperkaya dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh pendalaman,

penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Di antaranya melalui berbagai literatur, jurnal, media elektronik dan cetak, juga media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan akurat, dilakukan penelitian lapangan di Arab Saudi (Jeddah, Mekkah dan Madinah) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para pakar, akademisi di beberapa universitas, dan tokoh yang terkait dengan pokok kajian.

Kata kunci: Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

DDC: 341

Defbry Margiansyah

REVIEW BUKU

KEKUATAN SOSIAL HUKUM: MENUNDUKKAN NEGARA KEKUATAN BESAR MELALUI INSTITUSI MULTILATERAL INDEPENDEN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 115-125

Dalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku *Norms Without Great Powers* memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi

tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Kata kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau.

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

**PANMUNJOM DECLARATION AND
KOREAN PEACE PROSPECTS IN
MOON JAE-IN AND KIM JONG-UN
ERA**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 1-13

The Panmunjom Declaration signed by two Korean leaders, Moon Jae-in from South Korea and Kim Jong-un from North Korea marked a new era in peace on the Korean Peninsula. Although skepticism about positive implications has emerged both domestically and internationally, the commitment of the two Koreas to end the war should be appreciated by the international community. This paper analyzes how the Panmunjom Declaration influences regional and international security as well as the prospects for Korean peace and unification after the Panmunjom agreement. Based on the analysis through a qualitative approach, it can be concluded that although there were some similarities between the Panmunjom High Level Meeting and the previous High Level Meetings in 2000 and 2007, what needs to be underlined is the fact that the two Korean countries still have the desire to create a peace regime. Although in realizing this, the involvement of two allied countries in Korea, namely the US and China, is still needed.

Keywords: Panmunjom Declaration, Korean peace, South Korea, North Korea, Moon Jae-in, Kim Jong-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

**POLITICAL CONSENSUS ON
GOLKAR PARTY CONFLICT IN
2014-2016**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 15-30

This study discusses the phenomenon of political consensus of Golongan Karya (Golkar) Party after internal conflict in 2014-2016. The Golkar Party consensus is a new phenomenon, because the previous Golkar Party conflict has always brought new parties. The results of the study showed that the Golkar Party consensus occurred in the three stages. First stages through the organization's channels, namely the Golkar Party Court, the second through legal channels, the third through the political channels. The political channels shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub Golkar Party in May 2016. Munaslub agreed on various matters, including (1) the decision to set Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) the change of Golkar Party's position to the supporting party of Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The political consensus of Golkar Party in 2016 was also conducted through intermediaries. The intermediaries in the political consensus of Golkar Party are Jusuf Kalla and Luhut Panjaitan acting as government representatives and also as Golkar Party officials. The new Golkar Party Leaders also made changes in the Golkar faction of the House of Representatives. Unlike before where the losing faction was removed, the Chairman of the Golkar Party Faction was filled by Setya Novanto (from

Aburizal Bakrie faction) and Secretary of Golkar Party Faction filled by Agus Gumiwang Kartasasmita (from Agung Laksono faction). While the Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I and II are affected by the conflict at the Center, also reorganized by leaders of the new Golkar Party. In each DPD I and II, participatory discussion was conducted to elect the leaders of the Golkar Party DPD, in purpose to unify the two stewardship in the region. As for Aburizal Bakrie and Agung Laksono, each given a position on the management of the Golkar Party. Aburizal Bakrie was given the position as Chairman of the Advisory Council of Golkar Party which last appeared during the New Order; while Agung Laksono was given the position of Chairman of the Golkar Party Expert Council.

Keywords: Golkar Party, Political Consensus, Political Party, Indonesia

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan and Samodra Wibawa

DYNAMICS OF DEMOCRATIC PEOPLE PARTY (PRD) MOVEMENTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF REVOLUTIONARY PARTY AND BROAD-LEFT PARTY PERSPECTIVES

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 31-48

Within a Marxist tradition, social movements and social changes cannot be viewed as separated from the class contradictions and struggles as well as the roles played by mass organisations or parties. The current development of Marxism resulted in the emergence of two polar traditions in political parties, between those with a vanguardist or revolutionary leanings and those of social-democratic or broad-left leanings. These two tendencies have their own advantages and drawbacks depending on the circumstances in which they operated. This study attempts to elaborate the movement dynamics of People's Democratic Party (PRD) in their efforts to achieve the ideals of socialism which they championed. I divided the history of PRD into two different periods, between the New Order period in which they maintained a revolutionary-vanguard tendency and the post-Reformasi period in which there is a shift towards social-democratic tendency that emphasised Soekarnoist ideology. This study also tries to uncover the material basis behind such

changes. Analysing these changes is crucial because the shift in tendency influenced the changes in the strategies to oppose capitalism and the tactics to establish the various steps towards socialism.

Keywords: Marxism, People's Democratic Party, Revolutionary Party, Broad-Left Party

DDC: 321.804273

Siswanto

LEADERSHIP OF DONALD TRUMP AND TURBULENCE OF WORLD ORDER

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 49-63

The background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.

Keywords: controversy, turbulence, American policy, President of Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DYNAMIC OF SUB-REGIONAL COOPERATION IN MALACCA STRAITS: CITY TO CITY CONNECTIVITY AS A SUPPORTING ECONOMIC CORRIDOR

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 65-80

Connectivity is one of the important factors in building a cooperation at bilateral, regional and international levels. City to city connectivity realm becomes the backbone in an economic corridor of a subregional cooperation like IMT-GT. This article presents a review of the dynamics of the two economic corridors, namely Medan–Penang Island connectivity and Dumai–Melaka connectivity at the Straits of Malacca, and a little review of the future of city to city connectivity for Indonesia and Malaysia. The writing method of this article is based on qualitative analysis, with the essence of the findings are that as the smallest node in connectivity realm, these two connectivities determine the dynamics of the economic corridors between Indonesia and Malaysia. And this condition will remain as an determining factor for the sustainable cooperation between the two countries, and for subregional cooperation of the IMT-GT in the future.

Keywords: subregional cooperation, city to city connectivity, economic corridor, the straits of Malacca

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

SUMMARY RESEARCH
THE CONTROL PATTERN OF
SPECIAL FUND MANAGEMENT:
POLITICAL PERSPECTIVE

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 81-96

This study examines the special fund management control patterns from a political perspective. There are three areas studied namely, Aceh, Papua, and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). These three areas are important to be learned since they have specialization and privileges in fiscal management, particularly special fund management. However, central government oversight of special fund management is weak. This is evidenced by the lack of supervision in terms of synergy, coordination, supervision, and supervision between levels of government (province/district). As a result, special fund management does not have a significant impact on improving democratic and harmonious governance through vertical (central-local) or

horizontal (local-local) relationships and improving the welfare of local communities. Therefore, this study proves the importance of monitoring to special fund management. The research methods are conducted through collecting supporting documents, in-depth interviews, and focus group discussion.

Keywords: controlling, special fund, a political perspective

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

SUMMARY RESEARCH
PROBLEMS OF THE POWER OF
POLITICAL ISLAM IN SAUDI
ARABIA, KUWAIT AND UNI EMIRAT
ARAB

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 97-113

Political Islam has a significant influence for a political dynamics in Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates. The Gulf War in 1991 has become catalyst for changes of monarchy policy, both internal and external. In Saudi Arabia the Islamist movement and their anti-liberal supporters took place during and after the war, which demanded change. While in Kuwait, the monarchy moves the opposition group. The formation of opposition Islamic Constitutional Movement (ICM) group against the government has attracted Muslim Brotherhood (IM) in a political conflict for reform. This is a challenge for ICM to gain wider political influence in the political constellation in Kuwait. While in the United Arab Emirates, the government claim the opposition as a threat for national security. The various of political Islam activities in Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates will be the focus of the research. The Research methods in this study used a qualitative methodology through deskriptive-analytical approach, fortified with the study literature and the fieldworks. To obtain deepening, this research begins by the searching of primary and secondary data through literature study. Among them through a various literature, journals, electronic media, well as the internet that provide important information for analysis and identify of map the Issues. To produce a sharp and accurate analysis, the studies the field research was conducted in Saudi Arabia (Jeddah, Mecca and Medina) through indepth interviews with experts,

academics at several universities and figures related with the subject matter.

Keywords: Political Islam, Saudi Arabia, Kuwait, and United Arab Emirates

DDC: 341

Defbry Margiansyah

BOOK REVIEW

THE SOCIAL POWER OF LAW: TAMING GREAT POWERS THROUGH INDEPENDENT MULTILATERAL INSTITUTIONS

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 115-125

For last decade, international institutions along with their rules have been perceived merely as an instrument for maintaining influences and interests of great power countries. However, Norms Without Great Powers offers novel theoretical account regarding the prospect for independent international institutions in the times of great powers ambivalence, such as United States, through the effects of “nested” social structure of international law. This research shows how social dimension of normative

international law shapes and restricts the behavior and expectation of the states in the conduct of international relations. The theoretical postulation drew on constructivist approach applied on empirical inquiry of of the Mine Ban Treaty and Rome Statute of International Criminal Court’s comparative case study. This article aims to highlight and review the book’s analysis critically. To this end, the critical review begins by elucidating main arguments, then providing presentation on main points of respective case studies. Finally theory-guided evaluation and its consequences on problems founds in the case of international law’s implementation promoted by “non-great power” multilateral institution will come up prior to concluding remarks.

Keywords: Multilateralism, international law, norms, power politics, ICC, MBT

RESUME PENELITIAN

PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB

SUMMARY RESEARCH

PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN SAUDI ARABIA, KUWAIT AND UNI EMIRAT ARAB

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: fakhryghafur@gmail.com

Diterima: 3 April 2018; direvisi: 28 Mei 2018; disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

Political Islam has a significant influence for a political dynamics in Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates. The Gulf War in 1991 has become catalyst for changes of monarchy policy, both internal and external. In Saudi Arabia the Islamist movement and their anti-liberal supporters took place during and after the war, which demanded change. While in Kuwait, the monarchy moves the opposition group. The formation of opposition Islamic Constitutional Movement (ICM) group against the government has attracted Muslim Brotherhood (IM) in a political conflict for reform. This is a challenge for ICM to gain wider political influence in the political constellation in Kuwait. While in the United Arab Emirates, the government claim the opposition as a threat for national security. The various of political Islam activities in Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates will be the focus of the research. The Research methods in this study used a qualitative methodology through deskriptive-analytical approach, fortified with the study literature and the fieldworks. To obtain deepening, this research begins by the searching of primary and secondary data through literature study. Among them through a various literature, journals, electronic media, well as the internet that provide important information for analysis and identify of map the Issues. To produce a sharp and accurate analysis, the studies the field research was conducted in Saudi Arabia (Jeddah, Mecca and Medina) through indepth interviews with experts, academics at several universities and figures related with the subject matter.

Keywords: *Political Islam, Saudi Arabia, Kuwait, and United Arab Emirates*

Abstrak

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yang diperkaya dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh pendalaman, penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Di antaranya melalui berbagai literatur, jurnal, media elektronik dan cetak, juga media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan akurat, dilakukan penelitian lapangan di Arab Saudi (Jeddah, Mekkah dan Madinah) melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para pakar, akademisi di beberapa universitas, dan tokoh yang yang terkait dengan pokok kajian.

Kata kunci: Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

Pendahuluan

Dewasa ini –terutama pasca terjadinya *Arab Spring*- agama dan politik menjadi diskursus yang menarik untuk diperbincangkan dalam kajian politik Timur Tengah dan Dunia Islam pada umumnya. Berbagai aktivitas untuk mengukuhkan agama dalam ranah politik demokrasi muncul di sejumlah negara, dimana Islam berusaha untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, baik di negara republik maupun monarki, di lingkungan masyarakat yang homogen maupun majemuk, di negara maju maupun berkembang. Karenanya, menurut Huntington, pada masa yang akan datang realitas semacam itu akan terus terjadi, dimana agama akan senantiasa menautkan diri dalam semua aspek kehidupan.¹

Kemunculan politik berbasis agama yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah pasca *Arab Spring*, tidak lepas dari peran kelompok Islam untuk menunjukkan eksistensinya di tengah kegagalan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang dibangun rezim. Karena itu, dalam wacana politik Timur Tengah kontemporer, Islam dipandang sebagai sebuah keyakinan yang mengilhami berbagai lapisan masyarakat serta berhasil mentransformasikan nilai-nilai sosial, politik dan ekonomi dalam kehidupan bernegara. Bahkan, sejumlah pemerintahan monarki tertarik menggunakan Islam untuk melegitimasi kebijakannya, baik dalam politik, hukum, maupun ekonomi. Hal inilah yang kita saksikan dalam realitas politik di Dunia Arab saat ini, dimana para penguasa di Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab berusaha mendekatkan simbol Islam untuk melegitimasi kekuasaannya.

Dinamika relasi antara agama dan kehidupan bernegara di tiga negara tersebut menarik untuk dikaji, terutama di tengah semakin menggeliatnya aktivisme Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Semangat untuk menegakkan Islam pun tumbuh mewarnai sepanjang sejarah politik di dunia Arab yang kemudian melahirkan konsep *ad-Din wa ad-Daulah* dalam arti kehidupan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai agama. Melalui paradigma ini, pemerintahan monarki menjadikan Islam sebagai agama resmi sekaligus sebagai sebuah sistem sosial, politik, ekonomi maupun hukum. Karenanya tidak mengherankan jika Imarah memandang bahwa kolaborasi antara agama dan negara telah melahirkan fenomena revivalisme Islam yang secara definitif dapat diartikan sebagai kebangkitan politik Islam.²

Di sisi lain, aktivisme keagamaan yang semakin berkembang di tiga negara kajian, telah mendorong tumbuh suburnya gerakan Islam yang menginginkan transformasi komprehensif dalam kehidupan sosio-politik dan ekonomi. Atas nama reformasi Islam, kelompok politik Islam muncul sebagai gerakan oposisi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Berdasarkan kompleksitas persoalan di atas, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: *Pertama*, faktor-faktor apakah yang menyebabkan tumbuhnya kekuatan politik Islam secara signifikan di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab? *Kedua*, bagaimanakah peran kekuatan politik Islam dalam dinamika sosio-politik di tiga negara? *Ketiga*, bagaimana implikasi peran kekuatan politik Islam terhadap kehidupan bernegara di tiga negara tersebut?

¹ Lihat: Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late 20th Century*, University of Oklahoma Press, 1991.

² Muhammad Imarah, *Al-Ushuliyah Baina Al-Gharbwa Al-Islam*, Kairo : DaarAsy-Syaruq, 1998, hlm.7-8.

Politik Islam: Sebuah Kajian Teoritis

Politik Islam merupakan konsep yang modern dalam wacana politik yang muncul setelah perang dunia pertama³ dan masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan akademisi. Perdebatan tentang politik Islam sering diartikan dan dikaitkan secara sempit dengan wacana fundamentalisme, radikalisme dan terorisme, meskipun hal tersebut masih dalam lingkup dan menjadi salah satu aspek kajian politik Islam.

Olivier Roy memandang politik Islam sebagai gaya baru dari gerakan fundamentalisme Islam modern yang memiliki tujuan spesifik untuk menciptakan prototipe masyarakat Islam yang sebenarnya, dan tidak diwujudkan melalui pendekatan tradisional dengan menegakkan syariat Islam, tetapi mendirikan negara Islam melalui jalur politik yang dia kategorikan sebagai neo-fundamentalism.⁴ Roy berangkat dari asumsi yang hampir sama dengan Mohammed Ayoob yang memandang Islam bukan sekedar agama tetapi juga sebagai sebuah ideologi politik yang menjadi alat untuk mencapai tujuan politik yang terefleksi dari penggunaan simbol dan konsep yang Islamis di ranah publik.⁵

Namun, pendekatan definitif yang menganggap politik Islam sebagai ideologi politik harus dipisahkan dengan aspek faktual yang lebih kultural. Graham Fuller berpendapat bahwa politik Islam bukanlah faktor ideologis, tetapi merupakan kombinasi aspek religiusitas-kultural-politik yang sangat berkaitan dengan isu-isu dan memiliki tujuan politis sehingga mendorong masyarakat muslim untuk aktif didalamnya. Islam merupakan aspek integral dari keyakinan (*body of faith*) yang membentuk semua aspek sosial masyarakat dan memiliki aspek solutif dari kompleksitas permasalahan masyarakat modern.⁶

³ Lihat: Nazih N. Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. (London: Routledge, 1993).

⁴ Olivier Roy, *The Failure of Political Islam*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1994), hlm. vii-xi.

⁵ Mohammed Ayoob, *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008), hlm. 2.

⁶ Graham E. Fuller, *The Future of Political Islam*, (New York: Palgrave Mcmillan, 2004), hlm. 193.

Sementara itu Denoux berpendapat bahwa politik Islam merupakan hasil dari proses 'instrumentalisasi' ideologi, nilai dan doktrin Islam dalam sebuah organisasi gerakan Islam untuk mencapai tujuan politik (*political objectives*) sebagai respon terhadap tantangan dan problem dalam kehidupan sosial masyarakat Islam terkini.⁷

Muhammad Imarah memandang bahwa munculnya kekuatan politik Islam merupakan sebuah fenomena yang disebut *Ash-Shahwah Al-Islamiyyah* yang secara definitif diartikan sebagai Revivalisme Islam.⁸ Perbedaan mendasar definisi revivalisme Islam dan politik Islam adalah sudut pandang yang memperdebatkan posisi agama dalam kehidupan politik (negara). Politik Islam merupakan sebuah gerakan agama (Islam) yang bersifat privat yang memasuki ranah politik (publik). Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah pemisahan agama dan negara sebagai mana yang diungkapkan oleh Ayubi sebagai 'religiously-neutral states'.

Revivalisme Islam didasarkan pada konteks sejarah asal perkembangan politik dalam dunia Islam yang tidak memisahkan keberadaan negara dan agama. Revivalisme adalah upaya politis untuk mengembalikan dan merevitalisasi Islam dalam ranah politik dalam masyarakat Muslim. Revivalisme Islam ditandai dengan pengimplikasian ajaran Islam dalam kehidupan sosial-politik, budaya dan kehidupan ekonomi. Tujuan dari revivalisme Islam adalah terciptanya Islam *kaffah* dalam berbagai sektor kehidupan.

Menurut Antony Bubalo, kebangkitan Islam memiliki beberapa bentuk diantaranya adalah kesadaran masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam.⁹ Di sisi lain, Dekmeijan memandang bahwa fenomena revivalisme Islam ditandai dengan menguatnya aktivitas keagamaan yang meliputi partai politik, kelompok-kelompok pergerakan dan masyarakat Islam militant.

⁷ Guilain Denoux, "The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam", *Middle East Policy*, Vol.IX, No.2 (2002), hlm. 56-81.

⁸ Lihat: Muhammad Imarah, *Al-Ushuliyyah Baina Al-Gharbwa Al-Islam*, (Kairo: DaarAsy-Syaruq, 1998).

⁹ Lihat: Antony Bubalo, *Middle East, Islamism dan Indonesia*, (New South Wales: Low Institute for International Politic, 2005).



Gambar 1. Peta Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab

Sumber : <https://i1.wp.com/susris.com/wp-content/uploads//2015/05/iran-map.jpg>

Kelompok ini memiliki kesadaran tinggi dalam memperjuangkan Islam sehingga kerap berseberangan dengan pemerintah dan institusi-institusinya. Para pemikir Islam terdahulu, seperti Hasan Al-Banna, Al Maududi, Sayyid Qutb, Khomeini, Muhammad Baqi Sadr, Said Hawa dan lainnya banyak memberikan landasan ideologi bagi kebangkitan Islam kontemporer. Gerakan yang mereka usung bertujuan melakukan perubahan sistem sosial politik ke arah kehidupan Islami. Gerakan ini mempunyai pandangan bahwa Islam adalah *Ya'lu wala Yu'la 'alaih* "Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandinginya".

Terdapat lima prinsip utama dari gerakan kebangkitan Islam. *Pertama*, *Ad-Din* (agama) dan *Ad-Daulah*. Berdasarkan konsep ini Islam merupakan sebuah ajaran yang bersifat universal (*Syumuliyah al-Islam*) yang mengatur tatanan kehidupan sosial-ekonomi dan politik umat Islam. *Kedua*, Penerapan Al-Quran dan Assunnah secara kaffah. *Ketiga*, Puritanisme dan keadilan Sosial. *Keempat*, kedaulatan dan hukum Allah

berdasarkan syariat. *Kelima*, Komitmen kuat mewujudkan tatanan Islam (*An-Nizam Al-Islami*). Karenanya menurut pandangan gerakan ini, Islam harus menghancurkan tatanan Jahiliyyah dan kekuasaan melalui jihad.¹⁰

Berdasarkan sejumlah konsep tentang politik Islam seperti yang diutarakan beberapa ahli pemikir Islam di atas dapat ditarik benang merah bahwa tuntutan pelaksanaan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bernegara menjadi agenda gerakan politik Islam transnasional di Timur Tengah seperti yang dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin (IM) dan kelompok Salafiyah. Kehadiran keduanya diikuti oleh kelompok Islam lainnya seperti, Hizbut Tahrir, Hizbu Ad-Da'wah, Hizbullah, Jihad Islam, Jama'at Al-Muslimun At-Takfir dan organisasi Islam lainnya. Gerakan-gerakan Islam tersebut menjadi penggerak perjuangan politik Islam di Timur Tengah hingga berperan aktif dalam politik praktis.

¹⁰ Lihat: Sayyid Qutb, *Ma'alim fi Ath-Thariq*, terjemah, (Jakarta: Serambi, 1980).

Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab: Dimensi Historis

Diantara ketiga negara kasus, Arab Saudi merupakan negara yang paling besar, baik dari sisi kapasitas luas wilayah maupun jumlah penduduk.

Arab Saudi merupakan gabungan dari dua wilayah utama Nejd dan Hijaz. Secara sosial penduduk Nejd dihuni oleh suku-suku nomaden yang bekerja pada sektor jasa angkut dan pengamanan. Sebagian lagi beternak unta dan domba, dan hidup di kawasan oasis dengan berkebun.¹¹ Hijaz merupakan wilayah dengan tarikan politik yang tinggi karena terdapat dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. Wilayah ini memberikan legitimasi yang besar secara internasional yang diperebutkan Turki Ustmani, Mesir dan keluarga ibn Saud. Sedangkan wilayah yang tak kalah penting adalah al-Hasa. Wilayah paling plural merupakan hub bagi berbagai etnis Arab, Persia, Baluchi, Asia Selatan dan Afrika dari abad 17. Syiah banyak menduduki wilayah ini sebagian lagi di perbatasan Yaman.

Hubungan keluarga Saud dengan wahabi memiliki sejarah panjang sejak tahun 1740 (lebih dari 200 tahun). Keberadaan mereka saling mendukung, keluarga Saudi memberikan hak istimewa kepada ulama wahabi, dan para ulama memberikan legitimasi dan dukungan akar rumput yang kuat seiring jatuh bangun kekuasaan mereka di Nejd. Keluarga ibn Saud harus berhadapan dengan kekuatan Rashidi, Mesir, dan Turki Ustmani. Relasi yang monolitik kekuasaan ibn Saud dengan wahabi membuat kehadiran gerakan-gerakan Islam nyaris tidak mendapatkan tempat. Pada titik ini Saudi lebih ekstrim dengan melarang semua bentuk organisasi dan institusi independen berdiri di negara tersebut. Ada dua keuntungan yang terbentuk dari relasi ini, monopoli ini meminimalisir kelompok oposisi yang menentang kekuasaan ibn Saud, di sisi lain ulama wahabi menikmati keistimewaan sebagai otoritas keagamaan yang tunggal di Saudi.

Kuwait merupakan negara kecil di kawasan Teluk yang mempunyai posisi strategis sebagai

jalur lintas perdagangan minyak dan militer kawasan. Posisinya yang strategis -berbatasan langsung dengan dua wilayah kaya minyak, Irak di utara dan Arab Saudi di Selatan-, menjadikan Kuwait sebagai negara yang kerap diperebutkan bangsa-bangsa lainnya. Tercatat sepanjang sejarahnya, wilayah Kuwait silih berganti berada di bawah kekuasaan banyak dinasti yang berlangsung selama berabad-abad lamanya, seperti dinasti Buyid dari Persia pada abad 10, dinasti Seljuk dari Turki pada abad 11, bangsa Mongol di awal abad 14 dan Turki Usmani pada abad 17. Dari sini dapat dilihat, meskipun wilayahnya kecil, banyak kelompok etnis maupun suku dari luar yang ingin menetap dan bekerja untuk mencari kehidupan di wilayah Kuwait yang makmur. Karena itu, banyak orang terutama dari Arab Turki yang menyebut wilayah ini dengan sebutan “Kuwait” atau benteng kecil sebagai tempat berlindung dan mencari penghidupan.¹²

Secara historis, wilayah yang sekarang menjadi Uni Emirat itu, telah menarik para migran dan pedagang dari berbagai wilayah, seperti Cina, India bahkan dari Eropa. Pada abad ke-18, misalnya, Portugal dan Belanda ingin memperluas kekuasaannya di wilayah tersebut, namun kemudian mundur seiring dengan pertumbuhan kekuatan angkatan laut Inggris di sana. Pada abad ke-19, Inggris menandatangani serangkaian kesepakatan dengan para penguasa di Emirat. Kesepakatan itu menghasilkan wilayah yang dikenal sebagai “Negara-negara Trucial” (disebut juga sebagai “Trucial Oman” atau “Trucial Sheikhdoms”). Penguasa Emirat setuju untuk menyerahkan wilayahnya kepada perlindungan Inggris.¹³

Setelah Perang Dunia II, negara-negara yang tergabung dalam “Trucial Sheikhdoms” memperoleh kemerdekaannya. Bahrain menyatakan merdeka pada 15 Agustus 1971; Qatar mendeklarasikan kemerdekaan pada 3 September 1971. Kemudian enam keemiratan

¹² Shafeeq Ghabra, Kuwait at the Crossroads of Change or Political Stagnation, Middle East Institute, Policy paper Series, May 2014.

¹³ Lihat: <https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates>, diakses pada 24 Oktober 2017; <http://www.uae-embassy.org/about-uae/history>, diakses pada 29 September 2017.

¹¹ David Commins, *Islam in Saudi Arabia*, (London and New York: I.B. Tauris, 2015), hlm. 17-18.

bergabung dalam Uni Emirat Arab (UEA) dan menyatakan merdeka pada 2 Desember 1971. Wilayah UEA bertambah besar setelah Ras al-Khaimah ikut bergabung pada tahun 1972.

Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi

Populasi Arab Saudi per pertengahan 2016 mencapai 31.79 juta jiwa. 36.8% diantaranya merupakan imigran dari berbagai sektor ekonomi seperti infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembantu rumah tangga. Mayoritas para imigran itu berasal dari negara-negara Asia dan Arab seperti India, Mesir, Bangladesh, Srilanka, Filipina, Indonesia dan Pakistan. Namun menurut data dari Human Right Watch, Saudi memiliki banyak kasus terutama pada sektor pekerja domestik (pembantu rumah tangga).

Sebaran penduduk Saudi terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi dengan laju urbanisasi yang tinggi baik warga negara Saudi maupun non-Saudi. Kota-kota seperti Riyadh, Makkah, dan Wilayah Timur mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dikarenakan banyaknya lapangan pekerjaan dan proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah.¹⁴

Sentralitas Arab Saudi sebagai produsen minyak dunia menguat sejak negara tersebut menjadi pemasok ke negara-negara Eropa dan Amerika di tahun 1948 melalui pembangunan Trans Arabian Pipe Line yang sudah dimatikan.¹⁵ Selain itu, untuk memotong jalur minyak dan gas ke Eropa, Saudi membuat pipa minyak dan gas menuju Yanbu di kota Madinah, pesisir Barat Laut Merah. Hal ini secara signifikan memotong jalur perdagangan minyak menuju pusat perdagangan minyak dan gas di Teluk Persia. Terminal ini akan meningkatkan 30% kapasitas produksi dan varian distribusi perdagangan minyak Arab Saudi.¹⁶

¹⁴ Lihat: Asharaf Abdul Salam, "Population and Household Census, Kingdom of Saudi Arabia 2010: Facts and Figures," *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 No. 16 (Special Issue – August 2013).

¹⁵ "Trans Arabian Pipeline." *Britannica Encyclopedia*. <https://www.britannica.com/topic/Trans-Arabian-Pipeline>, diakses pada 29 September 2017.

¹⁶ "Saudi Aramco Yanbu Refinery," *Hydrocarbons Technology* [http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/aramco-](http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/aramco-yanbu/)

Pada tahun 2016, Arab Saudi ternyata tidak lagi menjadi produsen minyak terbesar di dunia. Saudi memproduksi sekitar 12.3 juta barel perhari, merupakan pemasok 13.4% kebutuhan minyak dunia dan menguasai 38.8% produksi minyak Timur Tengah. Sebenarnya sejak tahun 2014 produksi minyak Arab Saudi sudah berada di bawah produksi minyak Amerika.¹⁷ Dengan konsumsi minyak untuk keperluan dalam negeri Arab Saudi hanya sekitar 28.6%, Saudi sangat diuntungkan dengan surplus dari produksi minyaknya. Arab Saudi dan juga mayoritas negara-negara GCC, terjebak dalam *rentier state*. Ketergantungan APBN Saudi mencapai 43%.¹⁸

Seiring dengan turunnya harga minyak dunia GDP per kapita Arab Saudi turun di tahun 2016. Perekonomian Saudi diperburuk dengan peningkatan angka pengangguran yang mencapai 12.7%, lebih dari 70% diantaranya adalah pencari pekerjaan dari golongan perempuan. Lesunya perekonomian Arab Saudi belakangan ini berdampak juga pada pembelanjaan pemerintah yang menurun. Sirkulasi ekonomi dari sektor bisnis, hotel dan restoran turun hingga 0.8% per tahun dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada di bawah level 1%.¹⁹ Terpukunya ekonomi Saudi akibat harga minyak yang turun membuat visi 2030 ini mendapatkan momen.

Relasi yang terbentuk secara formal antara pemerintah Saudi dengan ulama diwujudkan melalui institusionalisasi lembaga ulama dalam *Hai'ah Kibar al-Ulama Lil-Buhuts wal-Ifta'* (Lembaga Ulama Senior untuk Riset dan Ifta'). Lembaga ini merupakan lembaga fatwa resmi Saudi yang disempurnakan oleh Raja Fadh menyusul wafatnya Mufti Saudi Abdul Aziz

yanbu/, diakses pada 29 September 2017.

¹⁷ BP Statistical World Energy Juni 2017. <https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf>; "USA Remains Largest Producer of Petroleum and Natural Gas Hydrocarbons," *US Energy Information Administration*, 23 Mei 2016. <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26352>, diakses pada 29 September 2017.

¹⁸ BP Statistical World Energy Juni 2017.

¹⁹ Dominic Dudley, "Is Saudi Arabia Heading For A Recession?" *Forbes*, 12 Juli 2016, <https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2016/07/12/saudi-recession/2/#6834a0d26330>, diakses pada 29 September 2017.

bin Baz (sering disebut sebagai bin Baz) di tahun 1999. Kekosongan ini sempat membuat Raja Fadh ragu karena tidak ada regenerasi yang cukup baik dengan kehadiran ulama pengganti setelah bin Baz. Penguatan lembaga ini menyeimbangkan otoritas keluarga Saud ke depan dengan mengangkat Abdul-Aziz ibn Abdullah Al-Sheikh sebagai kepala lembaga ini dan mufti pengganti di tahun 1999.

Lembaga ulama semacam ini sebenarnya bukanlah tradisi baru di Arab Saudi. Pada tahun-tahun sebelumnya lembaga ini secara informal terbentuk dan bekerja di bawah pimpinan mufti yang diangkat oleh raja. Hingga tahun 2009 keanggotaan lembaga ulama ini hanya diisi oleh ulama dari mazhab Hanbali. Perubahan terjadi sejak masa kepemimpinan Raja Abdulah yang menyertakan ulama dari tiga mazhab lainnya, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i dengan menggenapkannya menjadi 21 anggota ulama.

Fungsi dari lembaga ulama ini sangat sentral dalam pemerintahan Saudi. Mereka secara resmi digaji oleh pemerintah. Mereka memiliki tugas untuk memberikan nasehat dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil berkaitan dengan masalah keagamaan. Lembaga ini merupakan satu-satunya otoritas tunggal yang memiliki wewenang untuk membuat fatwa bagi permasalahan individu, atau permasalahan publik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah (sosial). Namun demikian di luar otoritas itu lembaga ulama senior ini sangat mewarnai politik dalam dan luar negeri Saudi yang sangat anti Syiah dan Iran yang menganut Itsna Asyariyah

Meskipun miskin pemberitaan, konflik internal antara pemerintah Saudi dengan kelompok Syiah masih terjadi hingga saat ini. Mereka berdiri berbasiskan suku dan kelompok seperti al-Baharna, Nakhawila, Bani Husaini, Bani Ali (Harb) dan Bani Juhaynah. Pertentangan pertama kali antara ulama-ulama wahabi dengan kelompok Syiah terjadi di Karbala, di sebelah selatan Iraq, pada tahun 1802. Dimana kelompok wahabi melakukan pembunuhan terhadap ribuan penganut Syiah. Peristiwa ini menjadi ingatan sejarah yang tidak dapat dilupakan dan menjadi akar konflik teologis antara wahabi dan Syiah. Pada kondisi politik kontemporer, akar

ketegangan yang terjadi di kawasan antara Arab Saudi dengan Iran tidak terlepas dari sejarah yang berdarah ini.²⁰

Kelompok oposisi syiah terbesar di Saudi sebenarnya merujuk pada ulama yang sangat berpengaruh dari Iraq, Muhammad Mahdi al-Shirazi. Kelompok ini di Saudi dipimpin oleh sheikh Hasan al-Saffar yang bertemu Shirazi di Kuwait tahun 1974. Setelah pertemuan itu Hasan bersemangat menghimpun anggota terutama dari kalangan pemuda hingga akhirnya mendirikan Organization of Islamic Revolution (OIR) di tahun 1979. Organisasi ini pada tahun yang sama aktif melakukan kritik terhadap pemerintah yang mengakibatkan banyak dari anggotanya ditangkap, dipenjara dan disiksa oleh aparat Saudi. Pada tahun-tahun berikutnya OIR menjadi organisasi nomaden yang menyetir kegiatannya dari Iran, Suriah dan Inggris.

Organisasi ini sangat aktif untuk mengkampanyekan korupsi di kalangan keluarga kerajaan. Saudi sendiri menganggap, kegiatan OIR yang sangat aktif didanai dan bagian dari politik luar negeri Iran untuk mendiskreditkan Saudi di kawasan. Saudi memecah kelompok OIR dengan membuat kebijakan yang lebih akomodatif. Pemimpin OIR Hasan al-Safari diundang ke rumah pribadi bin Baz. Hal ini membuat OIR lebih moderat dan berganti nama menjadi Reform Movement. Pada akhir-akhir ini friksi antara wahabi dan Syiah kembali menghangat dengan munculnya ulama Syiah yang baru Nimr al-Nimr dari provinsi Syarqiyah. Dia sangat kritis kepada pemerintahan Saud mengusulkan adanya pemilu terbuka dan pernah mengusulkan provinsi Syarqiyah memisahkan diri jika hak-hak kaum Syiah tidak dipenuhi. Perlawanan keras Nimr membuat pemerintah Saudi menangkap dan menjatuhkan hukuman mati baginya. Hal ini membuat babak baru konflik dalam negeri antara wahabi dan Syiah dimana gerakan protes dan pembunuhan rahasia terhadap polisi Saudi terjadi di wilayah Qatif, hingga akhirnya Saudi membombardir wilayah itu.

Selain dengan Syiah, Saudi juga memiliki sejarah panjang dengan Ikhwanul Muslimin (IM). Sejak pelarangan, penangkapan dan penyiksaan

²⁰ David Commins, *Islam in Saudi Arabia...* hlm. 3.

terhadap aktivis IM di berbagai negara seperti Mesir dan Suriah, banyak di antara mereka melarikan diri dan menjadi pengungsi direntang tahun 1950an dan 1960an. Sebagian besar para pengungsi IM tersebut adalah kaum terdidik dan terpelajar. Raja Faisal memanfaatkan SDM mereka untuk membangun dunia pendidikan Saudi yang masih tradisional. Bahkan banyak diantara mereka pernah menduduki posisi strategis di kementerian pendidikan dan menjadi perancang kurikulum dan grand desain sistem pendidikan Saudi.

Keberadaan IM menginspirasi terbentuknya gerakan *al-Sahwa al-Islamiyah* atau sering disebut Sahwa yang kritis pada pemerintah dan *Sururi* yang tidak mau menentang pemerintah. Organisasi ini merupakan penggabungan antara wahabi dan IM yang berbeda dengan negara asalnya yang masih mengadopsi sufisme namun sama-sama memiliki tendensi politik yang kuat. Pada perjalanannya Sahwa lebih banyak berkonflik dengan pemerintah. Sehingga ulama dan aktivisnya banyak yang ditangkap. Serupa dengan Syiah, relasi pemerintah Saudi dengan Sahwa mengalami pasang surut. Friksi terjadi sering kali dipicu oleh isu-isu kontemporer misalnya kasus perang Irak-Kuwait, Arab Spring, dan kasus kudeta Jenderal As-Sisi.

Dukungan pemerintah Saudi terhadap kudeta Jenderal As-Sisi menuai kritikan dari dalam negeri terutama dari para ulama Sahwa. Pada 8 Agustus 2013, sebanyak 56 ulama, beberapa di antaranya merupakan ulama IM, turut menentang kebijakan Saudi. Politik dalam negeri Saudi juga menjadi memanas. Berbagai narasi disampaikan diantaranya larangan untuk turut mendukung penghancuran terhadap sesama pemerintahan Muslim, dan juga larangan bagi menentang pemerintahan muslim yang dipilih oleh rakyatnya.²¹

Keputusan Saudi yang berseberangan dengan kehendak sebagian besar ulama dan rakyatnya, menunjukkan kegusaran atas kekuasaannya. Dukungannya terhadap kudeta dan pelemahan kekuatan IM di Mesir mengandung beberapa konsekuensi: *pertama*, Saudi menggelontorkan miliaran dolar untuk mendukung pemerintahan

As-Sisi. *Kedua*, Saudi harus lebih aktif melemahkan kekuatan Sahwa di dalam negeri. *Kedua* upaya ini secara aktif dilakukan oleh pemerintahan Saudi. Untuk pertama kalinya pemerintahan Saudi melakukan pelarangan terhadap buku-buku IM dan menggagalkan berbagai acara ceramah yang dilakukan oleh ulama-ulama Sahwa.

Kewaspadaan terhadap IM menguat pada pemerintahan Raja Salman. Pada tanggal 4 Februari 2017, Salman mengeluarkan Dekrit yang berisi: *pertama*, menyatakan organisasi IM yang berbasis di Mesir sebagai organisasi teroris. *Kedua*, melarang segala bentuk ekspresi dukungan terhadap IM. *Ketiga*, hal ini juga berlaku kepada semua organisasi yang berafiliasi terhadap IM termasuk Sahwa dan juga Sururi.²² Dekrit ini juga mengandung konsekuensi politik, dimana politik luar negeri Saudi cenderung bertentangan dengan negara-negara yang dianggap dekat dengan IM seperti Turki dan Qatar. Terlebih lagi stabilitas politik dalam negeri Saudi yang memanas akibat Arab Spring, propaganda Qatar yang mendukung gerakan tersebut, dan pemberitaan Aljazeera yang sering menyudutkan pemerintahan Saudi, kebijakan yang keras terhadap Qatar menjadi pilihan rezim Salman. Hanya berselang satu bulan dari dekrit itu, Saudi menarik duta besarnya dari Qatar dan berlanjut pada kebijakan luar negeri yang sangat keras dengan memblokir negara tersebut.

Kekuatan Politik Islam di Kuwait

Mayoritas penduduk Kuwait (sekitar 90 persen) adalah Muslim dari total penduduk sekitar 4,398 juta jiwa.²³ Sekitar 75 persennya bermazhab Sunni Maliki dan Hanbali yang cukup berpengaruh dalam kehidupan warganya, baik itu pada taraf masyarakat kelas menengah, ulama, maupun keluarga elite monarki. Sementara sisanya sekitar 15 persen adalah penganut Syiah. Kelompok Syiah dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu Syiah Arab atau Syiah Kuwaiti

²² *Ibid.*

²³ Kuwait Population 2017, <http://countrysimeters.info/en/Kuwait>, data terbaru diakses pada September 2017.

²¹ *Ibid.*

sekitar 20 persen dari total penduduk Syiah, sedangkan sisanya adalah Syiah yang berasal dari Iran.²⁴ Dengan pengaruh Islam yang sedemikian kuat, wajar kiranya bila rakyat dan penguasa Kuwait menjadikan Islam sebagai agama resmi dan Syariat Islam sebagai sumber utama hukum negara, sebagaimana tertera dalam konstitusi pasal 2, bahwa “*The religion of the State is Islam, and the Islamic Sharia shall be a main source of legislation*”. Dengan demikian, berdasarkan teks konstitusi tersebut agama resmi negara adalah Islam dan pemerintah harus mengarahkan umat Islam pada jalur yang benar sesuai syariat sehingga dapat diterima pada setiap aspek kehidupan masyarakat Kuwait.

Sementara itu, dinamika politik di Kuwait tidak dapat dilepaskan dari persinggungan yang kuat antara pemerintah monarki dan komunitas sosial-politik yang tumbuh pada pertengahan abad ke 20 seiring dengan dibentuknya negara Kuwait modern. Sepanjang sejarahnya politik Kuwait pun kerap diwarnai oleh relasi yang kuat di satu sisi dan pertentangan pada sisi lainnya antara dinasti As-Sabah dengan komunitas suku maupun dengan kelompok oposisi yang dipelopori oleh kelompok Islam. Pergulatan antara aktor politik di Kuwait dapat dilihat dari dinamika politik di parlemen yang banyak terjadi perbedaan pandangan dalam menentukan sebuah kebijakan. Menurut Ghabra, terdapat tiga kelompok utama yang menjadi aktor dalam kancah politik Kuwait, antara lain elit monarki, komunitas suku, dan kelompok oposisi baik dari kalangan Islam maupun liberal.

Di Kuwait, Emir adalah simbol negara yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan dewan menteri serta membubarkan parlemen sesuai dengan keputusan konstitusi. Emir secara turun temurun berasal dari generasi Mubarak As-Sabah yang berkuasa setelah mengambil alih kekuasaan pada akhir abad ke 19. Sementara itu, perdana menteri yang mengendalikan kabinet dan pemerintahan berasal dari unsur monarki yang dijabat oleh putra mahkota atau pangeran. Namun, atas desakan publik, sejak 2003, posisi Perdana Menteri menjadi terpisah dari struktur monarki,

meski posisinya tetap ditunjuk oleh Emir dinasti As-Sabah.

Pada awal masa kemerdekaan, monarki Kuwait dipimpin oleh generasi As-Salim yang berkuasa pada tahun 1965 di bawah pimpinan Syekh Abdullah As-Salim As-Sabah. Generasi As-Salim merupakan monarki pertama yang membidani lahirnya konstitusi 1962 yang menjadi dasar dari prinsip-prinsip demokrasi Kuwait. Dinasti ini membentuk badan legislatif, eksekutif dan sistem peradilan yang independen. Badan legislatif disebut Majelis Nasional atau parlemen yang beranggotakan 50 orang yang dipilih melalui jalur pemilihan umum.

Majelis ini mempunyai posisi istimewa dalam struktur politik di Kuwait, karena di samping dapat meminta penjelasan Emir juga dapat melakukan mosi tidak percaya, membubarkan kabinet dan memberhentikan Perdana Menteri. Posisi kepemimpinan monarki kemudian beralih pada dinasti Al-Jabir di bawah pimpinan Syekh Jabir Al-Ahmad As-Sabah. Penguasa baru ini mempertahankan tradisi politik dinasti sebelumnya yaitu melaksanakan konstitusi 1962, memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi melalui menyelenggarakan pemilu.

Dari dinamika politik yang terjadi pada masa kepemimpinan Al-Jabir As-Sabah, dapat kita saksikan bahwa dari tahun ke tahun perseteruan antara legislatif dan eksekutif semakin meningkat. Tercatat sebanyak lima kali penyelenggaraan Pemilu baru, enam kali pembubaran Parlemen, yaitu pada 2006, 2008, 2009, 2010, 2012 dan 2016. Menurut Ghabra, bahwa krisis politik yang berkelanjutan tersebut menunjukkan dinamika hangat politik Kuwait dalam beberapa tahun terakhir, disamping semakin terhambatnya proses reformasi politik-ekonomi serta semakin menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Dalam konteks politik nasional, kelompok oposisi dapat dibagi dalam tiga kekuatan utama, yaitu, kelompok oposisi Islam, gerakan populer yang terdiri dari Kuwaiti Democratic Forum, National Democratic Alliance, Progressive Kuwaiti Movement. Sementara kelompok independen, kebanyakan terdiri dari para aktivis, baik intelektual, pemuda maupun suku yang mempunyai pandangan kritis

²⁴ Shafeeq Ghabra, "Kuwait at the Crossroads of Change or Political Stagnation..." hlm 9-10.

terhadap pemerintah. Meski ketiga kelompok ini mempunyai tujuan yang sama dalam hal reformasi politik, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantara mereka, terutama terkait dengan masalah kebijakan sosial-politik, agama dan kebijakan luar negeri.

Secara ideologis, aktivisme politik Kuwait didominasi oleh beberapa arus, diantaranya adalah kelompok pedagang liberal, arus nasionalis dan progresif yang terinspirasi pemikiran Nasserisme dan Ba'athisme, kelompok ini berkembang sekitar tahun 1970an, kemudian kelompok yang berhaluan Islam, seperti Ikhwanul Muslimin (IM) dan Salafi. Pada bagian ini akan dikaji secara lebih mendalam tentang kekuatan politik Islam yang perannya cukup signifikan dalam kancah politik Kuwait. Menurut Katzman, kelompok politik Islam sesuai afiliasinya dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok oposisi Islam yang terdiri dari faksi politik *the Islamic Constitutional Movement (ICM)* dan Salafiyah. Sementara kelompok pro-Monarki terdiri dari kalangan Syiah dengan beragam alirannya.²⁵

Gerakan ICM merupakan sayap politik IM yang cukup berpengaruh dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Kuwait. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang simpati dengan aktivitas sosial-politik ICM serta banyaknya anggota IM yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.²⁶ ICM didirikan sebagai gerakan politik Islam gaya baru di Kuwait yang didirikan pada 30 Maret 1991 dengan tujuan untuk melakukan reformasi pemerintah secara legal disamping perannya dalam bidang sosial dan amal.

Menurut Amanda Rudman, kemunculan ICM di Kuwait dilatarbelakangi oleh kekecewaan sebagian anggotanya terhadap IM Internasional yang seolah diam dan membiarkan Irak melakukan invasi ke Kuwait pada Agustus 1990, sehingga gerakan ini memutuskan hubungan dengan IM internasional. Di Kuwait, ICM tumbuh karena dorongan sebagian anggotanya untuk memperjuangkan reformasi sosial-politik melalui Social Reformation Society (SRS) dengan mendirikan badan amal Islam yang berafiliasi

²⁵ Courtney Feer, *The Rise of Pragmatic Islamism in Kuwait's Post Arab Spring Opposition Movement*, August, 2015.

²⁶ *Ibid.*

dengan pengikut IM yang sudah ada sebelumnya. IM Kuwait sendiri pernah mengalami perpecahan pada tahun 2003 dengan munculnya dua kubu kepemimpinan IM.²⁷

Pasca kekalahan pada Pemilu, ICM melakukan restrukturisasi organisasi secara drastis dengan menciptakan Majelis Umum ICM yang beranggotakan 70 orang disamping sekretariat ICM yang beranggotakan 21 orang dan sembilan orang untuk mengisi jabatan di kantor urusan politik ICM. Menurut sebagian kalangan, restrukturisasi ini dimaksudkan untuk membentuk organisasi atau faksi politik resmi yang diizinkan oleh pemerintah dalam menghadapi Pemilu baru. ICM pun merombak jajaran pimpinannya dengan memprioritaskan anggota yang lebih muda dan moderat dibanding kalangan yang lebih tua. Terbukti dengan perombakan pada masa awal tersebut, beberapa kali ICM dan kelompok yang tergabung dalam block oposisi memperoleh suara yang signifikan, seperti pada pemilu baru 2012, 2014 dan 2016.

Selain ICM gerakan yang juga berkembang di Kuwait adalah Salafiyah, gerakan Salafi di Kuwait dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu Salafi yang Puritan dan Aktivis. Kaum Salafi puritan lebih kuat dan berkembang di dalam negeri, sementara Salafi yang aktivis lebih banyak mempunyai pendukung di luar negeri.²⁸ Salafi puritan cenderung kurang politis dan lebih memilih untuk fokus pada penguatan keagamaan dan penegakan nilai Islam yang sesuai dengan As-Salaf As-Salih. Sementara Salafi yang aktivis sejak lama terlibat dalam politik praktis di Kuwait. Bahkan dalam pemilu parlemen 2012, kelompok ini memperoleh suara yang cukup signifikan dan sempat mendominasi kursi parlemen. Hanya saja, dominasi dan sikap represif monarki menjadikan kelompok ini terpinggirkan.

Jika melihat diantara kekuatan politik Islam yang tumbuh di Kuwait, tampaknya ICM merupakan kelompok yang paling siap dalam menghadapi terpaan krisis dan dominasi kuat monarki, hal itu disebabkan ICM lebih

²⁷ Lihat: Ghabra, S., "Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait", *Middle East Policy*, 5, 2 (1997).

²⁸ Zoltan Pall, *Kuwait Salafism and Its Growing Influence in the Levant*, Carnegie Endowment for International Peace, 2014.

mengedepankan reformasi damai dalam aksinya ketimbang harus menempuh cara-cara kekerasan. Hal ini berbeda dengan lainnya seperti Syiah, yang sudah terfragmentasi secara politis dengan menjadi kelompok pro-monarki, mereka tidak memiliki organisasi politik yang cukup baik di tengah semakin meningkatnya krisis politik Kuwait.

Sebagai negara yang cukup dinamis dalam hal sosial-politik, Kuwait merupakan negara yang mencoba mengedepankan politik “high profile” dalam setiap kebijakan luar negerinya. Dalam konteks politik regional, Kuwait kerap menunjukkan sikap pro-aktifnya dan menempatkan diri sebagai salah satu negara yang menjadi mediator dalam berbagai persoalan dan krisis yang melanda sejumlah negara Timur Tengah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Kuwait untuk menjadi negara penyeimbang di kawasan Timur Tengah. Belum lama ini misalnya, Kuwait menjadi negara yang memfasilitasi pertemuan antara Qatar dan Arab Saudi, serta sejumlah negara lainnya yang terlibat konflik, seperti Yaman, Suriah, dan Libya.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Kuwait menjadi negara yang banyak terlibat aktif dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan di daerah konflik dan mengatasi persoalan dunia, seperti halnya isu Palestina-Israel. Sebagai negara yang terlibat dalam GCC, Liga Arab dan OKI. Hubungan Kuwait dengan negara-negara Islam yang terlibat konflik sangat kuat, terlebih dukungannya terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Belum lama ini, Kuwait menjadi salah satu negara yang memprakarsai proposal damai Palestina-Israel, serta rekonsiliasi antara kelompok Hamas dan Fatah. Karena, posisinya tersebut, wajar kiranya sebagian kalangan memandang, bahwa apa yang dilakukan Kuwait untuk menjadi penyeimbang kekuatan di tengah krisis diplomatik antara Qatar dengan GCC yang dimotori Arab Saudi.

Ada beberapa alasan yang mendorong Kuwait untuk menunjukkan “high profil” dan banyak terlibat aktif dalam kebijakan politik luar negerinya. Antara lain, kemampuan militer dan meningkatnya ekonomi Kuwait dalam beberapa tahun terakhir melalui pendapatan dan ekspor minyak telah memicu Kuwait untuk banyak

terlibat aktif sebagai penyeimbang kekuatan di tengah mulai pudarnya pengaruh Qatar dan Arab Saudi di kawasan. Disamping itu, sebagai sekutu dekat Saudi, Kuwait di bawah Emir Al-Jabir As-Sabah mempunyai posisi tawar yang begitu kuat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan konflik yang melanda Timur Tengah saat ini.

Kekuatan Politik Islam di Uni Emirat Arab

Jumlah penduduk UEA diperkirakan sekitar 9.423.740 jiwa (tahun 2017). Dari jumlah tersebut, hanya 10% yang menjadi warga negara UEA dan sisanya terdiri dari ekspatriat.²⁹ Menurut Undang-undang di sana, setiap ekspatriat diperbolehkan mengajukan diri menjadi warga negara UEA, setelah mereka tinggal di negara tersebut selama dua puluh (20) tahun, dengan syarat mereka tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan dan mereka dapat berbicara bahasa Arab. Penduduk ekspatriat terbesar di UEA berasal dari Asia Selatan (58%), diikuti oleh orang Asia lainnya (17%) dan ekspatriat Barat (8,5%).³⁰

Sejak ekspor minyak 1962, ekonomi Abu Dhabi mengalami peningkatan ekonomi. Awal 1970an, pertumbuhan ekonomi Uni Emirat sangat fenomenal. Industri minyak dan gas dikelola dengan baik dan teknologi terbaru. Hal ini dipertahankan terus untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral UEA, kapasitas produksi minyak harian maksimum Emirat adalah 2 juta barel per hari. Kapasitas produksi terpasangnya lebih dari 3 juta barel per hari. Pada tahun 2000, cadangan minyak Emirat adalah 98,8 miliar barel. Di dunia Arab, jumlah itu menempatkan UEA pada posisi ketiga, setelah Arab Saudi dan Irak. Cadangan minyak di Emirat diperkirakan hampir 10 persen dari cadangan minyak dunia yang telah terbukti pada bulan Juni 2000. Berdasarkan produksi minyak harian saat ini sebesar 2,2 juta barel per

²⁹ Lihat <http://worldpopulationreview.com/countries/united-arab-emirates-population/>. Diakses pada 30 Oktober 2017.

³⁰ *Ibid.*

hari, diperkirakan cadangan minyak di UEA akan bertahan selama lebih dari 122 tahun.³¹

Sementara itu, cadangan gas Emirat diperkirakan mencapai 6 triliun meter kubik pada tahun 2000. UEA diperkirakan memiliki cadangan gas alam setara dengan 4 persen gas dunia. UEA memegang cadangan gas alam terbesar keempat di dunia. Produksi gas harian diperkirakan pada tahun 1999 menjadi 2940 juta kaki kubik. Cadangan gas Emirat diperkirakan bertahan lebih dari 60 tahun.³²

UEA memiliki salah satu ekonomi paling terbuka di Timur Tengah. Tradisi menyambut bisnis dan perdagangan itu bisa kembali ke sejarah awal wilayah Teluk Arab, ketika kapal-kapal berlayar dari Eropa ke India. UEA terus menjadi pusat strategis, dengan zona bebas yang ramah bisnis dan ekonomi yang tumbuh dengan cepat. Negara ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan PDB rata-rata selama 2000 sampai 2006 di Emirat sekitar 8,4 persen. Ini tertinggi di antara negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang rata-rata 6,5 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) Emirat untuk tahun 2014 adalah US \$ 419 miliar.³³

Ekspor minyak Emirat mencapai sekitar 30 persen dari total PDB negara Teluk tersebut. Melihat kondisi harga minyak yang terus turun, UEA memangkas produksi minyak 139 ribu barel perhari.³⁴ Dalam sepuluh tahun terakhir, harga minyak dunia cenderung mengalami penurunan. Bila pada pertengahan 2008, harga minyak mencapai 140 dollar Amerika per barel, maka pada pertengahan 2017, harga minyak dunia berkisar 50 dollar Amerika per barel. Kondisi saat ini lebih baik dibandingkan pada awal tahun

2016, di mana harga minyak dunia sampai di bawah 40 dollar Amerika per barel.³⁵

Untuk mengatasi ketergantungan pada minyak, UEA meluncurkan program diversifikasi dan liberalisasi ekonomi. Mereka ingin mengubah ekonominya dari ekonomi konvensional padat tenaga kerja menjadi ekonomi yang berdasarkan pengetahuan, teknologi dan tenaga kerja terampil. Pemerintah federal dan pihak swasta Emirat telah banyak berinvestasi di berbagai sektor, seperti produksi aluminium, pariwisata, penerbangan, perdagangan, dan telekomunikasi. Maka, di sana ada istilah Visi 2021, Visi Ekonomi Abu Dhabi 2030, dan Rencana Strategis Dubai 2015.

Secara ekonomi, UEA melakukan perubahan. Akan tetapi, secara politik UEA nyaris tidak melakukan perubahan. Memang, pola sistem politik UEA dirancang untuk mempertahankan warisan lama yang disesuaikan dan digabungkan dengan struktur pemerintahan modern. Uni Emirat Arab (UEA) mengenal lima kelompok kekuasaan. *Pertama*, kelompok kekuasaan tertinggi adalah apa yang disebut sebagai “Dewan Tinggi Federal atau Federal Supreme Council-FSC (داحة اللى عالى سلجم)”. Dewan ini terdiri dari tujuh Emir yang tergabung dalam UEA. FSC adalah badan konstitusional tertinggi di UEA. Dewan ini menetapkan kebijakan umum dan sanksi undang-undang federal. FSC juga memilih Presiden (dan Wakil Presiden) dari para Emir tujuh emirat. Di antara para Emir, dua Emir, yaitu Emir Abu Dhabi dan Emir Dubai memiliki hak veto dalam pemilihan Presiden.³⁶

Kedua, jabatan Presiden dan Wakil Presiden (رئيس و نائب). Presiden menunjuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan anggota Kabinet. *Ketiga*, jabatan Dewan Menteri (داحة اللى عالى سلجم). Dewan Menteri ini dipimpin oleh Perdana Menteri yang dirangkap oleh Wakil Presiden. *Keempat*, kekuasaan legislatif, ada Dewan Nasional Federal atau Federal National Council-FNC (داحة اللى عالى سلجم). Dewan ini memiliki 40 anggota, yang terbagi menjadi dua bagian. Setengah anggota FNC (20 orang) ditunjuk oleh tujuh Emir mewakili wilayahnya

³¹ Mohamed Shihab, “Economic Development in the UAE”, dalam Ibrahim Al Abed dan Peter Hellyer (eds.), *United Arab Emirates: A New Perspective*, (London: Trident Press Ltd., 2001), hlm. 250.

³² *Ibid.*

³³ Lihat: “UAE Economy.” <http://www.uae-embassy.org/about-uae/uae-economy>. Diakses pada 29 September 2017.

³⁴ Christine Novita Nababan, “Uni Emirat Arab Pangkas Produksi Minyak 139 Ribuan Barel” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171002092931-85-245486/uni-emirat-arab-pangkas-produksi-minyak-139-ribu-barel/>. Diakses pada 24 Oktober 2017.

³⁵ “Crude Oil,” <http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=10y>. Diakses pada 25 Oktober 2017.

³⁶ Country Watch, “United Emirat Arab: 2017 Country Review,” <http://www.countrywatch.com>, hlm. 63.

dan setengah (20 orang) anggota yang lainnya dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan mereka adalah empat tahun. Pasal 68 Konstitusi UEA menyebutkan bahwa 40 kursi anggota FNC itu didistribusikan ke masing-masing Emirat dengan komposisi berikut: wilayah Abu Dhabi mendapatkan 8 kursi, Dubai 8 kursi, Sharjah 6 kursi, Ras al-Khaimah 6 kursi, Ajman 4 kursi, Umm al-Quwain 4 kursi, dan Fujairah 4 kursi.³⁷ *Kelima*, kekuasaan yudikatif (يُدَاخِطُ الْإِصْرَ). Sistem hukum UEA didasarkan pada sistem Syariah dan pengadilan sipil.

Di UEA, partai politik dilarang. Pemilu dilaksanakan dengan memilih langsung nama kandidat anggota perlemen yang diusulkan secara independen. Sampai tahun 2017 ini, Uni Emirat Arab sudah melaksanakan tiga kali pemilihan umum (pemilu) anggota FNC. Pemilu pertama diadakan pada bulan Desember 2006. Pemilu kedua pada bulan September 2011. Pada waktu itu, ada 469 kandidat (termasuk 85 wanita) untuk 20 kursi yang diperebutkan di FNC. Pada tahun 2015, pemilu anggota FNC diadakan pada 3 Oktober 2015. Pemilu 2015 diikuti oleh 330 kandidat (termasuk 74 wanita).

Secara nasional, kekuatan politik di UEA didominasi oleh kekuasaan para Emir. Kekuatan tertinggi disimbolkan dengan adanya “Dewan Tinggi Federal atau Federal Supreme Council-FSC (دَاخِطُ الْإِصْرَ أَلْإِسْلَامِيَّ)”. Selain kekuatan politik nasional, di UEA ada pemerintahan lokal dari masing-masing Emirat. Tujuh Emirat yang ada di sana, tidak sama persis dalam menerapkan kehidupan pemerintah lokalnya. Mekanisme mereka berbeda dari satu emirat ke emirat lainnya, tergantung pada faktor-faktor seperti populasi, luas, dan tingkat perkembangan.

Bagaimana dengan kekuatan politik Islam di UEA? Partai politik dilarang keberadaannya di sana. Ada anggota parlemen dipilih tanpa melalui partai politik. Apa yang disebut sebagai kekuatan politik Islam di UEA adalah sekumpulan masyarakat yang membawa ide-ide keislaman

³⁷ Sebelum Ras al-Khaimah bergabung ke dalam UEA, jumlah anggota FNC adalah 34 orang. Kemudian berdasarkan Keputusan Dewan Tinggi Federal (FSC) No. 3 Tahun 1972, jumlah tersebut diubah menjadi 40 orang.

dalam kiprah kehidupannya. Salah satu yang menonjol adalah Ikhwanul Muslimin (IM).³⁸

IM di Emirat berbeda dengan IM di negara lain. Hal ini bisa jadi berkaitan dengan karakter negara Emirat yang unik. IM pertama kali didirikan di Dubai pada tahun 1974, dengan dukungan dari pemimpin Emirat Dubai yang juga menjabat Wakil Presiden negara UEA, Sheikh Rashid bin Saeed al-Maktoum. Sheikh Rashid juga memberikan kontribusi pada pendirian cabang-cabang IM di Ras al-Khaimah dan Fujairah. Sedangkan Presiden UEA yang juga penguasa Abu Dhabi, Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan, pada mulanya mau menyediakan lahan untuk pendirian cabang IM di Abu Dhabi, pada akhir tahun 1970-an, namun akhirnya IM tidak mendapatkan izin di Abu Dhabi. Di wilayah Sharjah, IM juga tidak memiliki cabang. Sementara itu, di wilayah Ajman, keberadaan IM diposisikan di bawah *Irshad* (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Sosial).³⁹

Awalnya IM menangani kegiatan sosial dan budaya. Dalam majalah kelompok IM, *al-Islah*, terlihat topik yang paling sering dibahas adalah menyangkut perkembangan pendidikan Islam, penyensoran terhadap informasi yang berasal dunia Barat, seperti tulisan di majalah atau program televisi, pembatasan penjualan alkohol, masalah korupsi di pemerintahan, dan perambahan bisnis dan budaya asing (terutama Barat) dalam masyarakat Emirat. Memang, IM ingin mengembangkan sebuah agenda reformasi politik melalui kegiatan dan program sosial. Mereka juga mendesak kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengarah distribusi kekayaan yang lebih setara.⁴⁰ Pada awal Maret

³⁸ Lihat: Courtney Freer, “*Rentier Islamism: The Role Of The Muslim Brotherhood In The Gulf*” *LSE Middle East Centre Paper Series*, 09, (November 2015), hlm. 11-13.

³⁹ Mansur al-Noqaidan, “Al-Ikhwan al-Muslimun fi al-Imarat: Al-Tamaddad wa-l-Inhisar” (“The Muslim Brotherhood in the Emirates: Expansion and Decline”), dalam *Al-Ikhwan al-Muslimun fi al-Khalij (The Muslim Brotherhood in the Gulf)*, ed. by Al-Mesbar Studies and Research Centre, (Dubai: Al-Mesbar Studies and Research Centre, 2012), hlm. 61.

⁴⁰ Pekka Hakala, “Opposition in the United Arab Emirates”, *Quick Policy Insight*, Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament, 15 November 2012, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491458/EXPO-AFET_SP%282012%29491458_EN.pdf. Diakses pada 31 Januari 2017.

1979, Dewan al-Islah Emirat, menulis sebuah surat kepada penguasa setempat menjelang pertemuan *Al-Majlis al-A'la lil-Ittihad* (Dewan Penguasa Tertinggi), yang mendukung usaha pemerintah untuk mengurangi korupsi dan untuk menghabiskan uang minyak dengan cara “saleh”.⁴¹ Pada tahun 1982, majalah *al-Islah* lebih eksplisit menjelaskan posisi mereka menentang larangan pemerintah terhadap majalah Islam. Mereka menganggap Islam dapat menyelesaikan berbagai masalah. Katanya: “*With Islam we liberate lands of Islam, we stop injustice to Islam. Tyrants are afraid of us because of Islam*”.⁴²

Kiprah IM di wilayah Teluk Arab, sejak tahun 1950an dan 1960an. Mereka melarikan diri dari Mesir. Mereka adalah individu berpendidikan, profesional, dan kalangan yang mempunyai mobilitas tinggi. Mereka bekerja di sektor publik dan swasta, termasuk sektor peradilan dan pendidikan.⁴³ Pada awal 1990an, sektor peradilan dan pendidikan UEA seakan menjadi “suatu negara dalam negara” (*a state within a state*). Bidang itu dikuasai oleh pengikut IM. Dewan mahasiswa dan asosiasi profesional (serikat ahli hukum dan guru) berubah menjadi pos terdepan bagi kepentingan Ikhwanul Muslimin.⁴⁴ Melihat perkembangan demikian, penguasa Emirat mulai membatasi ruang gerak kelompok IM.

Pada tahun 1994, Dewan Direksi *al-Islah* dipecat dan diganti oleh pendukung pemerintah. Pejabat yang berafiliasi dengan IM dipecat dan orang-orang sekitarnya dipindahkan ke institusi lain.⁴⁵ Pemimpin Al-Islah berpaling kepada penguasa Ras al-Khaimah, Sheikh Saqr bin Muhammad al-Qasimi, yang mengizinkan mereka untuk mendirikan IM di emirat tersebut. Bahkan, Al-Qasimi menunjuk saudaranya,

Sheikh Sultan bin Kayed al-Qasimi⁴⁶ sebagai ketua cabang IM Ras al-Khaimah. Mereka juga membuka cabang lain di Fujairah sekitar waktu itu.

Setelah peristiwa serangan 9/11 tahun 2001, penguasa UEA merasa ada ancaman terhadap stabilitas nasional dan regional. Kemudian, otoritas UEA memutuskan untuk mereformasi sistem pendidikan dan kurikulum sekolah. Para pengkhotbah diwajibkan untuk mematuhi khotbah yang telah disetujui oleh Kementerian Kehakiman dan Urusan Islam. Pengawasan juga dilakukan kepada orang-orang yang dicurigai berpartisipasi dalam kegiatan Islam untuk mencegah penyebaran ideologi yang dianggap radikal.⁴⁷

Ratusan orang yang dianggap radikal, ditahan oleh *Amn al-Daulat* (Aparat Keamanan Negara). Selain itu, beberapa kalangan yang dianggap mempunyai kaitan dengan *al-Islah* (pengacara, hakim, guru dan profesor di universitas) dibatasi ruang geraknya. Bahkan, ada yang dilarang berpartisipasi dalam seminar atau acara publik. Ada juga yang diancam pencabutan izin profesional mereka. Nasib yang sama dialami pula oleh ratusan pegawai Kementerian Pendidikan. Sebagian guru dipaksa untuk pindah profesi atau pensiun dini.⁴⁸ Penguasa UEA berusaha membatasi ruang gerak kelompok yang berafiliasi dengan *al-Islah*.

Pada tahun 2009, sejumlah aktivis, termasuk mahasiswa dan blogger, meluncurkan sebuah situs untuk berdiskusi berjudul www.uaehewar.net.⁴⁹ Situs tersebut menarik perhatian masyarakat Emirat. Ribuan pengguna internet yang berbasis di UEA segera memenuhi situs itu dan berdiskusi di sana. Situs itu dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai tempat terbaik untuk mengemukakan keluhan, menantang pihak berwenang dan mendiskusikan masa depan negara Emirat.⁵⁰

⁴¹ Al-Noqaidan, “Al-Ikhwan al-Muslimun fi al-Imarat...”, hlm. 65-66.

⁴² Abdullah Abu al-Hadi, “Why Ban Islamic Magazines?”, *al-Islah* 30/50 (1982), dikutip dalam Humaid, *The Roots of Conspiracy Against the UAE* 2, hlm. 172.

⁴³ Sultan al-Qassemi, “The Brothers and the Gulf”, *Foreign Policy*, 14 December 2012. <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>. Diakses pada 18 Oktober 2017.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Marta Saldana, “Rentierism and Political Culture in the United Arab Emirates: The Case of UAEU Students”, PhD Dissertation (Exeter: University of Exeter, 2014), hlm. 139

⁴⁶ Sheikh Sultan bin Kayed al-Qasimi dihukum 10 tahun penjara, pasca Arab Spring.

⁴⁷ Saldana, “Rentierism and Political Culture...”, hlm. 139-140.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Situs itu sudah tidak dapat diakses lagi.

⁵⁰ Christopher Davidson, “Fear and Loathing in the Emirates,” <http://carnegieendowment.org/sada/49409>. Diakses pada 23 Oktober 2017.

Dalam beberapa pekan, perdebatan seru terjadi pada sejumlah isu -termasuk kekayaan pribadi keluarga yang berkuasa dan keberlanjutan proyek investasi dan prestise luar negeri Emirat.

Pada Januari 2010, terjadi debat publik yang paling kontroversial dalam situs tersebut. Melalui dunia maya situs itu, ribuan pengguna internet di Emirat mengomentari pembebasan hukuman anggota keluarga penguasa Abu Dhabi yang telah dituduh melakukan penyiksaan dan sodomi. Sebagian besar masyarakat Emirat mengkhawatirkan penerapan hukum yang tidak adil tersebut akan berdampak reputasi internasional UEA. Diskusi itu begitu intens dan berbagai komentar memenuhi laman situs tersebut. Akhirnya, penguasa Emirat merasa tersudutkan. Pada perkembangan berikutnya, situs www.uaehewar.net tidak dapat diakses. Bila ada pengguna internet yang akan mengunjungi situs diskusi tersebut, maka akan disambut pesan “server problem.”⁵¹ Akan tetapi, penguasa Emirat tidak dapat memblokir situs tersebut dari akses di luar negeri, situs masih dapat bertahan sampai tahun 2011. Dengan menggunakan mirror web itu, masyarakat Emirat di dalam negeri dapat mengaksesnya. Maka, ketika muncul apa yang disebut sebagai “Arab Spring”, mereka masih dapat berdiskusi dan membahas revolusi di Tunisia dan Mesir.

Penurunan penguasa di Tunisia dan Mesir memberikan inspirasi bagi masyarakat Emirat untuk menilai pemimpin mereka. Parlemen Emirat yang dianggap kurang dapat mewakili kepentingan rakyat dikritisi. Kekurangan penguasa UEA juga dibahas dalam diskusi. Pada Maret 2011, pendiri situs www.uaehewar.net bersama dengan sejumlah aktivis lainnya, menyebarkan petisi yang ditujukan ke penguasa Abu Dhabi. Salah satu tuntutan dalam petisi yang ditandatangani oleh 130 intelektual itu, adalah agar seluruh anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Petisi juga meminta agar UEA menjadi negara monarki konstitusional yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan prinsip dasar lainnya.

Ada empat organisasi masyarakat (ormas) UEA yang ikut menandatangani petisi tersebut, sebagai institusi. Empat ormas itu terdiri dari

⁵¹ *Ibid.*

asosiasi para ahli hukum, guru, profesional warisan nasional, dan dosen universitas. Keikutsertaan empat ormas itu, menambah bobot nilai dan tuntutan petisi. Para pemrakarsa dan penandatanganan petisi mempublikasikan pernyataan bersama mereka dengan mengatakan bahwa: “*civil society in the UAE considers that the time has come to ensure the right of political participation of every citizen, with direct elections for a council with full federal oversight and legislative powers.*” Petisi juga menuliskan “*the lack of involvement of citizens to choose their representatives, decades after the establishment of the state.*”⁵²

Penguasa Emirat menanggapi petisi itu dengan menangkap lima tokoh penandatanganan petisi. Pada awal April 2011, lima orang itu yang kemudian disebut sebagai “*UAE Five*” dijemput dari rumah masing-masing. Kelima aktivis tersebut adalah Ahmed Mansoor, seorang insinyur dan blogger; Nasser bin Ghaith, seorang ekonom dan dosen universitas di Sorbonne Abu Dhabi; dan aktivis online Fahad Salim Dalk, Ahmed Abdul-Khaleq, dan Hassan Ali al-Khamis. Mereka mulai disidang secara terbuka pada 14 Juni 2011. Kelima orang tersebut dikenai tuduhan atas pasal 176 dari undang-undang pidana. Mereka dituduh menghina pejabat publik, dengan menggunakan situs online terlarang (www.uaehewar.net).⁵³

Penutup

Politik Islam menjadi kajian kontemporer yang senantiasa menarik untuk diperdebatkan. Hal tersebut dikarenakan Islam bukan sekedar agama tetapi juga kerap dipandang sebagai sebuah ideologi politik, dalam arti Islam dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan politik yang terefleksikan dari penggunaan simbol-simbil keislaman di ranah publik. Lebih daripada itu, Islam kerap ditafsirkan bukan sebagai agama semata, tetapi juga ideologi, nilai, dan doktrin yang memberikan pondasi bagi gerakan sosial. Berpijak pada logika tersebut, sejumlah rezim monarki tertarik menggunakan Islam untuk

⁵² *Ibid.*

⁵³ Lihat: “UAE: Investigate Threats against ‘UAE 5’”, <https://www.hrw.org/news/2011/11/25/uae-investigate-threats-against-uae-5>. Diakses pada 23 Oktober 2017.

melegitimasi kebijakannya, baik dalam politik, hukum, maupun ekonomi. Hal inilah yang kita saksikan dalam realitas politik di tiga negara kasus.

Di Arab Saudi, misalnya, raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Pendirian organisasi independen hanya bisa tampil dalam wujud organisasi informal, termasuk gerakan Islam kecuali Wahhabi. Adapun dalam kasus Kuwait, konstitusi memberikan ruang bagi faksi atau organisasi politik untuk berkembang. Realitas ini dimanfaatkan oleh kekuatan politik Islam untuk tampil dalam konstelasi politik. Sementara itu, untuk kasus di Uni Emirat Arab, gerakan Islam semula mendapat kesempatan untuk tampil berdasarkan perlindungan Emir.

Hal menarik lainnya, kekuatan politik Islam di Arab Saudi diawasi dengan cukup ketat dan dimonopoli oleh ulama-ulama Wahhabi, sehingga gerakan politik Islam lainnya tidak berhasil terlembagakan. Namun demikian, pengaruh secara individual melalui jalur pendidikan dan organisasi internasional mampu menginfiltrasi masyarakat terdidik di Saudi. Sementara dalam kasus Kuwait kekuatan politik Islam semula terjadi pasang surut pengaruh, pergantian antara kekuatan Islam dan sekuler. Dewasa ini, gerakan politik Islam dapat mempengaruhi masyarakat etnis. Bahkan dalam konstelasi politik nasional kian mendominasi suara mayoritas parlemen. Dalam kasus Uni Emirat Arab, keberadaan gerakan politik Islam (Al-Islah), akhirnya secara bertahap gerakan Islam di Emirat ditekan, karena dalam perkembangan terlalu dominan dalam bidang pendidikan dan peradilan.

Meski kekuatan politik Islam di ketiga negara dibatasi oleh kekuasaan monarki, namun perannya cukup signifikan. Di Arab Saudi, kebijakan politik pemerintah sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik Islam (Wahhabi), baik secara domestik maupun internasional. Bahkan didalam ranah pendidikan, Arab Saudi yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh orang-orang didikan Ikhwanul Muslimin pada akhirnya digantikan Wahhabi. Adapun di Kuwait, gerakan politik Islam yang kian dominan dalam masyarakat suku, bahkan di dalam parlemen mampu memasukkan implementasi syariat Islam dalam konstitusi. Sementara itu, dalam kasus

Uni Emirat Arab, Ikhwanul Muslimin (Al-Islah) semula mendominasi dunia pendidikan dan peradilan, sampai muncul istilah “suatu negara dalam negara”, namun belakangan fenomena ini dipangkas oleh berbagai kebijakan Emir, termasuk dengan penangkapan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ayoob, Mohammed. *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*, Ann Arbor: The University of Michigan Press. 2008.
- Ayubi, Nazih N. *Political Islam :Religion and Politics in the Arab World*. London : Routledge. 1993.
- Bubalo, Antony. *Middle East, Islamism dan Indonesia*. New South Wales : Low Institute for International Politics. 2005.
- Commins, David. *Islam in Saudi Arabia* (London and New York: I.B. Tauris. 2015.
- Esposito, John L. *Islam : The Straight Path*. Oxford University Press. 2011.
- Freer, Courtney. *Rentier Islamism: The Role Of The Muslim Brotherhood In The Gulf*. LSE Middle East Centre Paper Series. 2015.
- Fuller, Graham E. *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Mcmillan. 2004.
- Huntington, Samuel P., *The Third Wave : Democratization in The Late 20th Century*, University of Oklahoma Press. 1991.
- Imarah, Muhammad. *Al-Ushuliyyah Baina Al-Gharbwa Al-Islam*, Kairo: Daar Asy-Syaruq. 1998.
- James P.Piscatori. “Ideological Politics in Saudi Arabia”, dalam James P.Piscatori, ed., *Islam in the Political Process*. Cambridge: Cambridge University Press. 1983.
- Pall, Zoltan. *Kuwait Salafism and Its Growing Influence in the Levant*. Carnegie Endowment for International Peace. 2014.
- Qutb, Sayyid. *Ma'alim fi Ath-Thariq* (Terjemah). Jakarta: Serambi. 1990.
- Roy, Olivier. *The Failure of Political Islam*, President and Fellows of Harvard College. 1994.
- Shihab, Mohamed. “Economic Development in the UAE”, dalam Ibrahim Al Abed dan Peter Hellyer (eds.), *United Arab Emirates: A New Perspective*. London: Trident Press Ltd. 2001.
- Watt, Montgomery. *Islamic Fundamentalism and Modernity*. Harvard University Press. 1996.

Jurnal

- Al-Hadi, Abdullah Abu. "Why Ban Islamic Magazines?", *al-Islah* 30/50 (1982) dalam Humaid, *The Roots of Conspiracy Against the UAE* 2.
- Al-Noqaidan, Mansur. "Al-Ikhwan al-Muslimun fi al-Imarat: Al-Tamaddad wa-l-Inhisar" ("The Muslim Brotherhood in the Emirates: Expansion and Decline), dalam *Al-Ikhwan al-Muslimun fi al-Khalij (The Muslim Brotherhood in the Gulf)*, ed. by Al-Mesbar Studies and Research Centre. Dubai: Al-Mesbar Studies and Research Centre. 2012.
- Al-Qassemi, Sultan. "The Brothers and the Gulf", *Foreign Policy*, 14 December 2012. <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>.
- Asharaf Abdul Salam, "Population and Household Census, Kingdom of Saudi Arabia 2010: Facts and Figures," *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 No. 16 (Special Issue – August 2013).
- Dekmejian, R. Hrair. "The Rise of Political Islam in Saudi Arabia", *Middle East Journal*. Vol.48. No.4 (1994).
- Ghabra, Shafeeq. "Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait", *Middle East Policy*, 5, 2 (May 1997).
- "Kuwait at the Crossroads of Change or Political Stagnation". Middle East Institute. Policy paper Series. May 2014.
- Guilain, Denoeux, "The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam", *Middle East Policy*, Vol.IX, No.2 (2002).
- Rudman, Amanda et al. "Domestic Dynamics of Political Islam in the Greater Middle East: Case Studies of Jordan, Egypt, Kuwait and Turkey", *Cornell International Affairs Review*, Vol.1, No.1 (2007).
- Saldana, Marta. "Rentierism and Political Culture in the United Arab Emirates: The Case of UAEU Students" (PhD Dissertation). Exeter: University of Exeter. 2014.
- Dudley, Dominic. 2016. "Is Saudi Arabia Heading For A Recession?" *Forbes*, 12 Juli, <https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2016/07/12/saudi-recession/2/#6834a0d26330>.
- Hakala, Pekka. 2012. "Opposition in the United Arab Emirates", *Quick Policy Insight*, Directorate-General for External Policies, Policy Department, European Parliament, dalam http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491458/EXPO-AFET_SP%282012%29491458_EN.pdf, diunduh pada 3 Maret 2016.
- Kuwait Population 2017, <http://countrymeters.info/en/Kuwait>, data terbaru diakses pada September 2017.
- Nathan, Brown. 2007. "Pushing Toward Party Politics? Kuwait's Islamic Constitutional Movement", *Carnegie Endowment for International Peace*.
- "Saudi Aramco Yanbu Refinery," *Hydrocarbons Technology* <http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/aramco-yanbu/>.
- "*Trans Arabian Pipeline*." *Britannica Encyclopedia*. <https://www.britannica.com/topic/Trans-Arabian-Pipeline>.
- "UAE: Investigate Threats against 'UAE 5'", dalam <https://www.hrw.org/news/2011/11/25/uae-investigate-threats-against-uae-5>.
- "USA Remains Largest Producer of Petroleum and Natural Gas Hydrocarbons," *US Energy Information Administration*, 23 Mei 2016. <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26352>.

Sumber Internet

- "BP Statistical World Energy Juni 2017." <https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf>
- Davidson, Christopher, "Fear and Loathing in the Emirates," <http://carnegieendowment.org/sada/49409>.

TENTANG PENULIS

Indriana Kartini

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Saat ini penulis tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI. Penulis dapat dihubungi melalui email: indriana.kartini@gmail.com

Meutya Viada Hafid

Penulis merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar sejak 2009 hingga kini. Lahir di Bandung pada 3 Mei 1978 dan memulai karirnya sebagai jurnalis di Metro TV. Penulis menyelesaikan pendidikan pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. adapun penulis dapat dihubungi melalui email: meutyahafidinfo@gmail.com

Arif Novianto

Penulis merupakan Asisten peneliti di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Peneliti di Pusat Studi Jerman UGM pada tahun 2015. Penulis dapat dihubungi melalui email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id

Lukman Kurniawan

Penulis merupakan Alumnus Departemen Sosiologi FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman pada tahun 2015.

Samodra Wibawa

Penulis merupakan Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman.

Siswanto

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia. Tergabung dalam tim penelitian Politik Luar Negeri, penulis sudah banyak menghasilkan karya-karya baik buku maupun jurnal. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: sish_jakarta@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bidang kajiannya adalah perbatasan. Sudah banyak karya berupa buku maupun jurnal yang ditulis oleh beliau. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: irewati62@gmail.com

M. Fakhry Ghafur

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tergabung dalam tim penelitian Agama dan Politik. Bidang kajiannya meliputi Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Penulis dapat dihubungi di email: fachryghafur@gmail.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis merupakan peneliti madya di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fokus kajiannya adalah Otonomi dan Pemerintahan Daerah. Saat ini penulis tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Penulis dapat dihubungi melalui email: nyimas.letty@gmail.com; nyimas.letty@yahoo.com

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan kandidat peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia merupakan Alumnus *Global Studies Programme Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg*, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

